

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kontribusi hutan produksi terhadap ekonomi Indonesia pada tahun 2019 dapat dikatakan menurun. Dari PNBP pada tahun 2019 tercatat penerimaan sebesar 2,73 triliun rupiah, lebih kecil dari tahun 2018 yang mencapai 2,86 triliun rupiah. Produksi kayu bulat pada tahun 2019 dari hutan alam sebanyak 6,77 juta m³, HTI sebanyak 36,23 m³. Jumlah tersebut produksinya menurun dari tahun 2018, yang mana dari hutan alam memproduksi kayu bulat sebesar 8,60 juta m³, HTI sebesar 40,14 juta m³. Tingkat investasi juga menurun, tahun 2019 nilai investasi sebesar 128,14 triliun rupiah, sedangkan tahun 2018 lebih besar yaitu 155,71 triliun rupiah. Namun demikian, terdapat kenaikan dari produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK). Tahun 2019 mencatat produksi dari hasil hutan non kayu ini naik secara signifikan yaitu sebesar 474.198 ton dari sebelumnya tahun 2018 yang hanya sebesar 329.633 ton. Ekspor hasil hutan pada tahun 2019 juga sedikit meningkat yaitu senilai 11,64 milyar dolar Amerika, sedangkan tahun 2018 senilai 11,27 milyar dolar Amerika. Tenaga kerja yang terserap dari kegiatan hutan produksi mencapai angka 388.974 tenaga kerja, tidak beda jauh dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 382.279 tenaga kerja (KLHK, 2020).

Sumberdaya hutan mempunyai peranan penting dalam mendorong kontribusi pendapatan daerah termasuk Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini dimaksudkan untuk menurunkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, dengan cara meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga daerah dapat membiayai pembangunan daerahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan intensifikasi dapat berupa memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan dan meningkatkan efisiensi administrasi dan menekankan biaya pemungutan pajak dan retribusi daerah. Sedangkan dalam pelaksanaan ekstensifikasi kegiatan yang dilakukan berupa menciptakan daya tarik dan iklim kondusif bagi investor yaitu dengan mempromosikan potensi dan keunggulan daerah, memberikan kemudahan bagi investor lokal maupun asing dengan menghilangkan birokrasi yang tidak sesuai, dan peningkatan objek pajak dan retribusi daerah dengan cara

menggali dan mendata lagi obyek-obyek pajak dan retribusi daerah yang bisa dikenakan pajak maupun retribusi daerah (Rahmi, 2015).

Provinsi Jambi memiliki kawasan hutan dengan luas 2.098.535 ha, kabupaten Muaro Jambi memiliki kawasan hutan dengan luas 143.440,28 ha, berdasarkan fungsinya hutan Muaro Jambi terdiri dari hutan lindung dengan luas 19.314,17 ha, hutan produksi dengan luas 88.881 ha, dan hutan produksi terbatas dengan luas 59,351 ha. Dengan luas kawasan hutan yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi saat ini dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi daerah. Kabupaten Muaro Jambi memiliki banyak potensi sumberdaya hutan yang cukup memadai untuk mendorong perekonomian daerah, serta mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi. Dalam hal ini, timbul kebijakan-kebijakan baru dalam sektor kehutanan khususnya di Daerah Kabupaten Muaro Jambi mengenai Peraturan Daerah (PERDA) tentang restribusi izin pengelolaan dan perusahaan di Kabupaten Muaro Jambi. Kabupaten Muaro Jambi juga memiliki kesempatan kerja yang tinggi. Penduduk Kabupaten Muaro Jambi sebagian besar memiliki pencaharian utama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sebanyak 55,99% (BPS Muaro Jambi, 2021).

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah pada 4 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2012 sampai 2016. Namun pada tahun selanjutnya penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Muaro Jambi sampai saat ini mengalami fluktuasi. Pendapatan asli daerah ini diperoleh baik dari sektor pertanian, pertambangan, peternakan, perkebunan, pariwisata, dan kehutanan serta peningkatan PAD juga diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pendapatan daerah dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, 2017). Namun dalam melaksanakan desentralisasi kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam peningkatan PAD yaitu minimnya pendapatan yang bersumber dari PAD. Hal ini dikarenakan masih belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada umumnya, disebabkan oleh faktor kurangnya kepekaan Pemda dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi PAD, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau

retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, dan ketidakoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai (Horota, 2017). Oleh karena itu, bila dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya hutan bisa lebih optimal, maka bisa meningkatkan kontribusi sub sektor kehutanan dengan cara menggali potensi-potensi yang ada, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah.

Maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai besarnya kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Muaro Jambi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja sumber dan jenis pendapatan daerah sektor kehutanan di Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Berapa besar kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sumber dan jenis pendapatan daerah sektor kehutanan di Kabupaten Muaro Jambi.
2. untuk menguraikan besaran kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi mengenai kontribusi sektor kehutanan Kabupaten Muaro Jambi terhadap pendapatan daerah sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi Dinas Kehutanan dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang dapat dikaitkan dengan perencanaan pembangunan kawasan hutan dan daerah di Kabupaten Muaro Jambi.